

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah mencakup tiga hal, yaitu hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak merupakan bentuk penerimaan yang mampu meningkatkan kekayaan daerah. Semua hak merupakan hak untuk memungut sumber-sumber pemerintah daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, atau hak untuk menerima sumber-sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang telah ditetapkan (Halim, 2002). Kewajiban adalah bentuk pengeluaran yang mampu menurunkan kekayaan daerah. Kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang guna membayar tagihan-tagihan atas kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

2.1.2. Organisasi Pengelola Keuangan Daerah

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

1. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), merupakan perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. SKPKD merupakan unit kerja pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, merupakan unit kerja pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, yang kemudian digunakan oleh SKPKD sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemakaian dana APBD

Struktur organisasi SKPD pada garis besarnya terdiri atas Kepala Badan/Dinas, Sekretaris/Bagian Umum, Bidang-bidang dan Jabatan Fungsional.

1. Sekretaris/Bagian Umum terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan dan keuangan
2. Bidang-bidang terdiri atas sub bidang sesuai dengan bidang yang ditangani oleh Badan/Dinas.
3. Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

Struktur organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan pelaksana urusan pemerintahan daerah pada garis besarnya terdiri atas:

1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
2. Sekretaris/Kepala Bagian Umum, selaku pejabat kuasa pengguna anggaran/barang.
3. Sub Bagian Keuangan pada Badan/Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha Kantor, selaku pejabat penatausahaan keuangan PD (PPK-PD).
4. Sub Bagian Umum/Perlengkapan dan Kepegawaian pada Badan/Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor, selaku pejabat pengurus/penyimpan barang.
5. Kepala Bidang/Sub Bidang pada Badan, Kepala Bidang/Seksi pada Dinas dan Kepala Seksi pada Kantor, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan PD (PPTK-PD)

6. Jabatan fungsional yang terdiri dari Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

2.1.3. Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Basis akuntansi akrual adalah pencatatan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi ekonomi, dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Sistem akuntansi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah sistem akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan fiskal berbasis akrual, sedangkan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, yaitu berbasis kas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik dapat berupa laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang menyajikan rincian berupa penjelasan lebih lanjut tentang pos-pos laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Ketujuh laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga organisasi sektor public wajib menyajikan ketujuh laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Berikut ini merupakan penjelasan atas komponen laporan keuangan pokok pada SAP berbasis akrual.

1. LRA, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh entitas pemerintah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
4. LAK, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
 5. LO, menggambarkan mengenai informasi kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang disajikan dan dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO adalah penerimaan oleh entitas pemerintah yang berasal dari kegiatan operasional dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah, yang akan berpengaruh pada hasil surplus/defisit-LO yang akan menambah ekuitas dana pada LPE.
 - b. Beban adalah semua pengeluaran oleh entitas pemerintah yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi kewajiban pemerintah, yang akan

berpengaruh pada hasil surplus/defisit-LO yang akan menambah ekuitas dana pada LPE.

6. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang terdapat dalam LPE adalah ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
7. CaLK, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LAK, LO, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkap di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan pengajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:
 - a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapekuitasan SAP berbasis akrual di Indonesia merupakan salah satu pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

2.1.4. Faktor Organisasi

Faktor organisasi, yaitu semua upaya organisasi untuk meningkatkan penguasaan dan mempromosikan inovasi ke semua unit organisasi. Upaya-upaya ini meliputi pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen Organisasi dalam implementasi inovasi. Inovasi dalam hal ini adalah

pengembangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dukungan teknis yang berupa pengembangan terhadap Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan, sosialisasi dan pemberian pendidikan. Adapun dukungan teknis, meliputi ketersediaan peralatan-peralatan pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Organisasi juga perlu memiliki komitmen yang kuat dan jelas terhadap keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Semua upaya organisasi tersebut perlu dilakukan secara konsisten, baik sebelum implementasi ataupun ketika implementasi telah berlangsung.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Pengertian sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Adventana,2014).

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti kecerdasan, kreatifitas, dan imajinasi, tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, dan sebagainya (Ndraha, 1997).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan dari sumber daya manusia yang terdiri dari kompetitif-generatif-inovatif yang dimanfaatkan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. OPD diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami proses penerapan akuntansi berbasis akrual, untuk mencapai keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

b. Faktor-faktor pembentuk sumber daya manusia berkualitas

Untuk memperoleh SDM yang berkualitas haruslah memenuhi persyaratan yang tinggi yaitu menguasai faktor-faktor pembentuk SDM berkualitas seperti IQ (*Intelligence Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), CQ (*Creativity Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*).

- 1) Untuk mendapatkan tingkat kecerdasan intelektual IQ yang tinggi, seseorang haruslah memperoleh pendidikan sejak dini. Karena melalui proses pendidikan inilah IQ seseorang dapat berkembang. Pemimpin dengan IQ yang tinggi akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di bidangnya maupun hal-hal lain. Pemimpin dengan IQ yang tinggi pun mampu menjaga keseimbangan tatanan sosial, dan ia pun mampu membuat dan melakukan strategic planning sehingga stabilitas dalam lingkungannya tetap terpelihara
- 2) Berikutnya, SDM yang memiliki kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi adalah SDM yang mampu mengendalikan diri, sabar, tekun, tidak emosional, tidak reaktif serta positif thinking. Untuk memperoleh

EQ ini, seseorang harus melalui pendidikan sejak dini dengan contoh suri tauladan dari kedua orangtuanya. Pada hakekatnya pengendalian diri ini terhadap dorongan-dorongan hawa nafsu dirinya sendiri, agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

- 3) Setelah EQ, ada yang namanya CQ (*Creativity Quotient*). Tingkat kecerdasan kreativitas yang tinggi adalah SDM yang kreatif, mampu mencari dan menciptakan terobosan-terobosan dalam mengatasi berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Kreativitas SDM dapat dimulai dan dikembangkan sejak dini. Dengan cara mulai diajarkan berpikir kritis agar dapat berinovasi dengan caranya sendiri. SDM dengan CQ yang tinggi mampu merubah bentuk dari suatu ancaman menjadi tantangan, dan dari tantangan menjadi peluang.
- 4) Selain itu, ada juga SQ (*Spiritual Quotient*). SDM dengan tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi adalah SDM yang tidak sekedar beragama, tetapi bertakwa kepada Allah SWT. (Tuhan Yang Maha Esa). SDM yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui apa-apa yang diucapkan, diperbuat bahkan isi hati atau niat manusia. Oleh karena itu, semua sikap, ucapan dan tindakannya selalu mengacu pada nilai-nilai moral dan etika agama dalam menjalankan amanah yang

dipercayakan kepadanya. SDM yang beragama dalam arti beriman dan bertakwa haruslah seseorang yang bermoral, dan tandanya orang itu bermoral dia taat pada hukum.

c. Unsur-unsur sumber daya manusia berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut :

1) Akhlak yang baik

Akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik, jujur, adil, serta berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Sehingga keberadaannya akan selalu berguna dan tidak sia-sia.

2) Keahlian

Manusia yang memiliki keahlian akan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan baik dalam segi waktu maupun kualitas. Jadi, manusia yang mempunyai keahlian akan sangat berguna untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas.

3) Kekuatan fisik

Kekuatan fisik manusia akan sangat berguna jika diarahkan pada hal-hal yang positif.

2. Komitmen Organisasi

a. Pengertian komitmen organisasi

Komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut (Rini, 2016).

Dengan demikian komitmen organisasi merupakan tingkat keinginan anggota organisasi untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik demi mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi. Komitmen yang dimiliki oleh pegawai OPD dapat mendorong keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan SAP yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

b. Komponen komitmen organisasi

Komitmen organisasi terbagi atas tiga komponen, yaitu afektif, normatif dan kontinuan. Setiap komponen memiliki dasar yang berbeda, yaitu:

1. Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi.
2. Komponen normatif merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan ke pada organisasi.
3. Komponen kontinuan berarti komponen berdasarkan persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapi jika ia meninggalkan organisasi (Heriyanti, 2007).

Pegawai dengan komponen afektif tinggi masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu pegawai dengan komponen kontinuan tinggi tetap bergabung dengan organisasi karena mereka membutuhkan organisasi. Pegawai yang memiliki komponen normatif tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

3. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi”, Edisi ke-3, Jakarta, Salemba Empat, 2001 menyatakan bahwa: “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIA adalah proses yang dilakukan oleh sumber daya organisasi yang berfungsi dalam mengumpulkan, mencatat, mengikhtisarkan semua transaksi keuangan dan mengubahnya ke dalam bentuk informasi untuk diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dalam organisasi.

b. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Wilkinson (1986) berpendapat bahwa tujuan sistem informasi dalam dunia bisnis dan pemerintahan mempunyai tiga tujuan utama, yakni (1)

menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, (2) menyajikan informasi guna mendukung operasi harian, (3) menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajerial, untuk itu pembelajaran dan tersedianya sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah sumber daya manusia dalam menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.

2.1.5. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Adventana,2014)

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Kurnia, 2013). SDM memiliki peran yang penting dalam penerapan SAP berbasis akrua, karena SDM merupakan penggerak dari kebijakan yang diimplementasikan. Kemampuan SDM perlu dikembangkan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan, dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan publik

tersebut. Pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpengaruh positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi (Kusuma, 2013).

Tingkat pendidikan staf akuntansi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Temuan empiris dari beberapa penelitian yang dilakukan, Adventana (2014), membuktikan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Dari penelitian yang dilakukan Rini (2016) dibuktikan bahwa Sumber daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

2.1.6. Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat dari anggota organisasi untuk melakukan suatu perbuatan yang mampu menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat pada Organisasi di instansi pemerintah akan mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar tujuan organisasi mencapai keberhasilan. Bekerja maksimal dalam hal ini adalah bekerja

keras, ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap kemajuan dan keberhasilan organisasinya. Apabila pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan keterlibatan mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menurut penelitian Adventana (2014) . Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Rini (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menguji kembali hubungan antara komitmen organisasi dengan tingkat penerapan SAP berbasis akrual. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

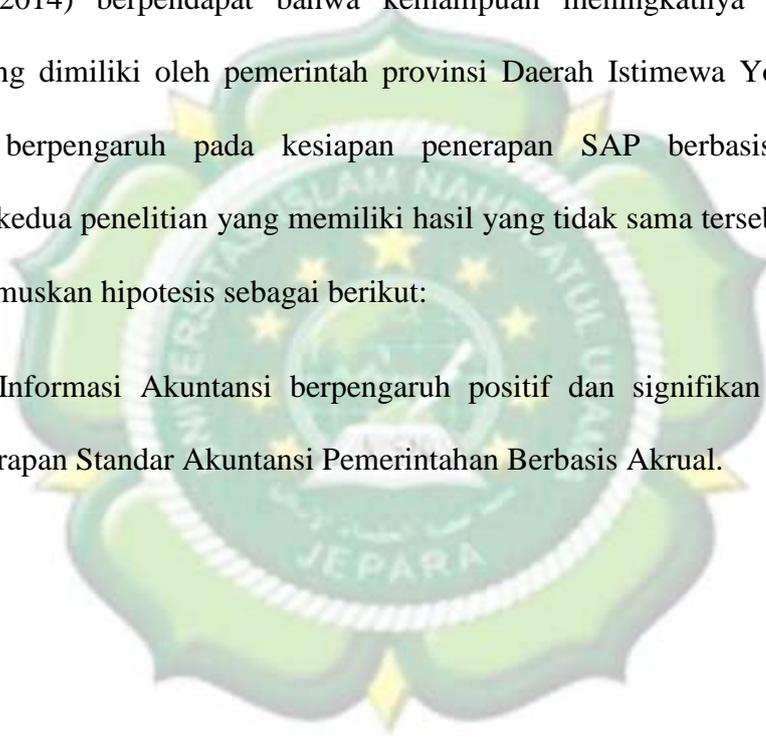
2.1.7. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa dan menyajikan informasi keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual akan didukung oleh infrastruktur dan sarana yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, dimana sistem informasi akuntansi akan memudahkan organisasi dalam pelaksanaan dan pengawasan transaksi ekonomi. Organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada

organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah (Kusuma, 2013).

Penelitian yang telah dilakukan Novi Kurnia Rini (2016) membuktikan bahwa SIA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan menurut penelitian Adventana (2014) teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Adventana (2014) berpendapat bahwa kemampuan meningkatnya teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan berpengaruh pada kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan kedua penelitian yang memiliki hasil yang tidak sama tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.



2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

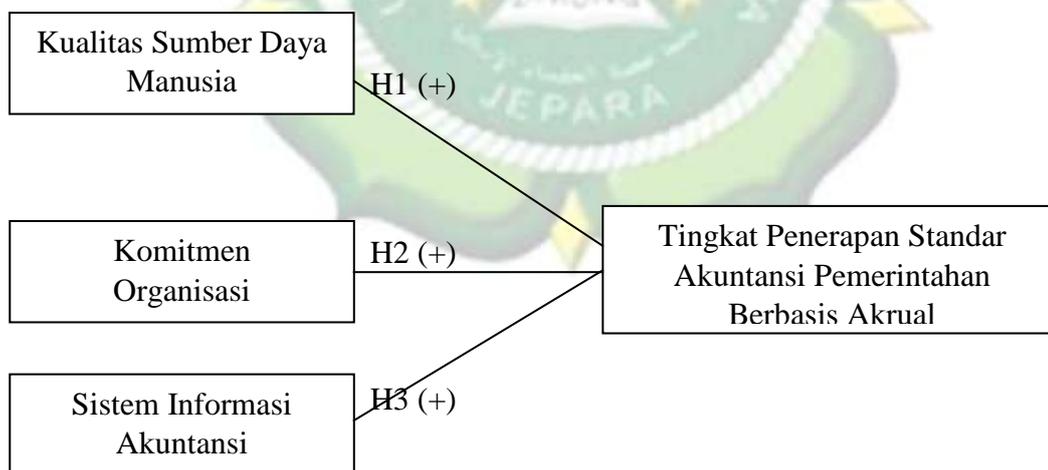
Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Variabel	Hasil
1	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah (Muhammad Indra Yudha Kusuma, 2013)	Tingkat pendidikan staf keuangan Pelatihan staf keuangan Kualitas teknologi informasi Dukungan konsultan Pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI Latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis Ukuran Organisasi	-Faktor pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akruaI terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akruaI. -Pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman sebelumnya dalam menjalankan basis kas menuju akruaI, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran Organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akruaI
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi Sap Berbasis AkruaI Menurut Pp No. 71 Tahun 2010 (Gabriella Ara Adventana, 2014)	Sumber daya manusia Komitmen organisasi Teknologi informasi Tata cara komunikasi	-Sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI -Teknologi informasi dan tata cara komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI

3	Pengaruh Faktor Organisasi Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Rini, 2016)	Sumber daya manusia Komitmen organisasi Sistem informasi akuntansi	-Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
---	---	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dikemukakan, gambar berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini



2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi (Nazir, 2003).

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1: Diduga Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- H2: Diduga Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- H3: Diduga Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

